



P U T U S A N

Nomor 220 /Pdt.G/2022 /PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Tempat / tanggal lahir : Sudaji, tanggal 20 Desember 1989, Jenis kelamin ; Perempuan, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Kecamatan Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Para Advokat , pada Kantor Hukum I Kadek Angga Satya Pardidinata, S.H & Rekan, yang beralamat di Singaraja - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 April 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 453 SK. TK.I / 2022 / PN Sgr, tertanggal 26 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Tempat / tanggal lahir : Penarukan, tanggal 9 Desember 1987, Jenis kelamin : Laki – laki, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Kecamatan Buleleng, selanjutnya, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 April 2022, yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 26 April 2022, dibawah register Nomor : 220 /Pdt.G/2022 /PN Sgr, dan aslinya diserahkan di persidangan pada tanggal 2 Juni 2022 dan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan menurut adat dan keyakinan Agama Hindu dihadapan pemuka Agama pada tanggal 20 Mei 2009 di Kelurahan Penarukan, Kabupaten Buleleng, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Oktober 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 15 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 220 /Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikarunia 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Penarungan pada tanggal 14 November 2009, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: ---, anak kedua bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Penarungan pada tanggal 25 Mei 2013, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: ---, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;

3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang, layaknya sepasang suami-istri pada umumnya:

4. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2016, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat beserta kedua anaknya, dan Tergugat tidak adanya rasa bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, yang membuat Penggugat harus bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga untuk menafkahi semua kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat tidak pernah menghargai usaha dari Penggugat, serta Penggugat telah dengan sabar untuk memberitahu Tergugat untuk mencari pekerjaan tetapi Tergugat selalu menolak, namun Penggugat selalu sabar dan menahan diri demi mempertahankan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi sekitar tahun 2018 oleh keluarga Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Kantor Desa, namun Tergugat selalu mengulangi kesalahannya setelah mediasi tersebut, sehingga Penggugat merasa sudah lelah, dan merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga sehingga tidak bisa lagi hidup berdampingan sebagai pasangan suami isteri, dan Penggugat memilih untuk cerai;

Halaman 2 dari 15 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 220 /Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Perempuan yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, dan anak laki-laki bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, berada dalam asuhan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975;
 - a. Kematian,
 - b. Perceraian, dan
 - c. Atas Keputusan Pengadilan.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:
 - 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
 - 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut diatas, maka alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni “ *perceraian dapat dilakukan jika antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi karena kedua pihak terjadi cekcok yang sulit didamaikan lagi*”;
10. Bahwa untuk menindak lanjuti pernyataan pisah secara baik-baik antara Penggugat dan Tergugat serta mendapat kepastian hukum yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B;

Atas dasar dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara adat istiadat dan

Halaman 3 dari 15 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 220 /Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan agama Hindu yang puput Jro Mangku Putu Rina pada tanggal 20 Mei 2009 di Kelurahan Penarukan, Kabupaten Buleleng, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Oktober 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah Sah Secara Hukum dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menyatakan bahwa 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Penarungan pada tanggal 14 November 2009, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: ---, anak kedua bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Penarungan pada tanggal 25 Mei 2013, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: --- tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak menghalangi Penggugat untuk mengunjungi anak-anaknya layaknya seorang Ibu memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (INKRACHT) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk proses Akta Perceraian ; -

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat ;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor : 220/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 11 Mei 2022, tanggal 20 Mei 2022 dan tanggal 3 Juni 2022, ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatannya Penggugat yang

Halaman 4 dari 15 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 220 /Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan pada gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor : Nomor : 220/ Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 11 Mei 2022, tanggal 20 Mei 2022 dan tanggal 3 Juni 2022, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak tiga kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.4 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 ;

Halaman 5 dari 15 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 220 /Pdt.G/2022/PN Sgr



Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : ---, tertanggal 28 Oktober 2013, dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Buleleng, dan bukti Surat P.4 berupa kartu tanda Penduduk Nomor : ---, tertanggal 2 September 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang mana di dalam bukti surat tersebut menerangkan bahwa TERGUGAT (Tergugat) sebagai Kepala Keluarga, berdasarkan bukti surat tersebut diperoleh Fakta bahwa TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGUGAT (Pengugat) adalah suami – istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Putu Rina, pada tanggal 20 Mei 2009 , bertempat di kelurahan Penarukan, Kabupaten Buleleng serta dikuatkan oleh keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, yang mana keterangannya saling berkesesuaian yang menerangkan bahwa Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang, pada tanggal 20 Mei 2009 , bertempat di kelurahan Penarukan, Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu) dan perkawinan dimaksud telah dicatatkan, dari pertimbangan tersebut petitum angka 2 tersebut dikabulkan dengan perbaikan rediaksional ;

Halaman 6 dari 15 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 220 /Pdt.G/2022/PN Sgr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau cekcok terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan.

Halaman 7 dari 15 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 220 /Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi 1 dan Saksi 2, yang mana keterangannya saling bersesuaian, diperoleh fakta antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus yang disebabkan karena tergugat sering kali melakukan pemukulan kepada penggugat dan tergugat suka minum – minuman keras hingga mabuk dan tergugat juga tidak mempunyai pekerjaan tetap, penggugat dengan tergugat sudah sejak 4 (empat) tahun tidak tinggal Bersama lagi dalam satu rumah sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan selama penggugat pergi meninggalkan rumah sama sekali tergugat tidak pernah mencari penggugat kerumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbaretwéespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam

Halaman 8 dari 15 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 220 /Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 yaitu Menyatakan bahwa 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Penarungan pada tanggal 14 November 2009, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: ---, anak kedua bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Penarungan pada tanggal 25 Mei 2013, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: --- tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak menghalangi Penggugat untuk mengunjungi anak-anaknya layaknya seorang Ibu memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, terhadap petitum nomor 3 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Akta Kelahiran, No : ---, tertanggal 29 Oktober 2013, yang menyatakan bahwa Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Penarungan, tanggal 12 November 2009, anak kesatu dari suami – istri TERGUGAT dengan PENGUGAT dan bukti P.3 yaitu Akta Kelahiran, Nomor : ---, tertanggal 18 Agustus 2020, yang menyatakan bahwa Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Laki – laki, lahir di Penarungan, pada tanggal 25 Mei 2013, anak kedua dari Ayah TERGUGAT dan Ibu Penggugat ,sekarang anak – anak penggugat dengan tergugat tersebut tinggal dengan Tergugat (Bapak kandungnya) .

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran anak - anak penggugat dan tergugat tersebut yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Penarungan, tanggal 12 November 2009, dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Laki – laki, lahir di Penarungan, pada tanggal 25 Mei 2013 dan dibandingkan dengan perkawinan

Halaman 9 dari 15 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 220 /Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 20 Mei 2009, maka anak - anak dimaksud lahir setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga anak - anak dimaksud merupakan anak - anak yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, ;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak – anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*”;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada bapaknya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri

Halaman 10 dari 15 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 220 /Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P.2 dan P.3 tersebut di atas, sampai saat putusan ini diucapkan usia anak – anak Penggugat dan Tergugat yaitu bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Penarungan, tanggal 12 November 2009 sekarang berumur 13 (tiga belas) tahun dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Laki – laki, lahir di Penarungan, pada tanggal 25 Mei 2013, sekarang berumur 9 (Sembilan) tahun ;

Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban hak asuh yang ada pada kedua orang tuanya (Bapak dan Ibu dalam hal ini Penggugat dan Tergugat), maka dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal (ranjang) dan anak – anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat (Bapak kandunganya) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimaksud, membuktikan bahwa anak - anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat sudah merasa bahagia dan nyaman tinggal dengan Tergugat (Bapak kandunganya), sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap anak - anak tersebut tetap berada pada Tergugat selama belum dewasa / belum dapat berdiri sendiri secara hukum, sedangkan hak untuk memelihara dan mendidik dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak – anak secara bersama-sama sampai anak - anak tersebut dewasa.

Halaman 11 dari 15 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 220 /Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana ia anak lahir dan tumbuh berkembang di tempat tinggal keluarga Tergugat (Bapak kandungnya) maka secara Psikologis anak - anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Tergugat yang berhak atas penguasaan anak – anak dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak – anak penggugat dengan tergugat tersebut dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak seutuhnya dari Tergugat selaku Bapak kandungnya, maka sudah sepatutnya hak penguasaan anak – anak tersebut diberikan pada Tergugat (Bapak kandungnya), oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat (Ibu Kandungnya) maupun Tergugat (Bapak kandunya) terhadap anak - anak tersebut dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak - anak tersebut. Hal ini berarti sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu kandung terhadap anak – anak untuk turut bertanggungjawab memelihara dan mendidik anak – anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak - anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 3 (tiga) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan yaitu Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (INKRACHT) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk proses Akta Perceraian, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu." Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja, sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban bagi pihak untuk melaporkannya sesuai petitum angka 4 di atas, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah diterima dan dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan dalam amar putusan kedua petitum tersebut dijadikan satu, serta kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara adat istiadat dan kepercayaan agama Hindu pada tanggal 20 Mei 2009 di Kabupaten Buleleng, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Oktober 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah Sah Secara Hukum dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 13 dari 15 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 220 /Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan bahwa 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Penarungan pada tanggal 14 November 2009, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: ---, anak kedua bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Penarungan pada tanggal 25 Mei 2013, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: --- tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak menghalangi Penggugat untuk mengunjungi anak-anaknya layaknya seorang Ibu memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami : Made Hermayanti Muliarta S.H, sebagai Hakim Ketua Wayan Eka Satria Utama, S.H dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 26 April 2022, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu I Nyoman Mudita, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wayan Eka Satria Utama, S.H

Made Hermayanti Muliarta S.H

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

I Nyoman Mudita, S.H

Halaman 14 dari 15 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 220 /Pdt.G/2022/PN Sgr



Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 480.000,-
4. PNPB : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,- +

sejumlah Rp 650.000,- (Enam Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) ;